



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI BARAT**

LAPORAN LKjIP

- LAPORAN
- KINERJA
- INSTANSI
- PEMERINTAH



DISKOMINFO KUBAR

Jalan Sendawar III – Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Barat

Website: diskominfo.kutaibaratkab.go.id

Email : diskominfo@kutaibaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (LKjIP) Tahun 2023 Kabupaten Kutai Barat. Adapun tujuan penyajian Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, sehingga perlunya saran maupun masukan yang bersifat perbaikan dalam penyempurnaan laporan ini serta perbaikan kinerja Diskominfo tahun kedepannya. Kami yakin kedepannya dengan kinerja yang lebih baik lagi akan mampu mewujudkan seluruh aspirasi berbagai pihak maupun stakeholder. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, referensi dan informasi mengenai hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2023.

Akhirnya Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan menyelesaikan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan.

Sendawar, 23 Februari 2023



Dokumen ini, telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat

RUSTAM, S.E., M.Si.
Pembina TK 1 (IV/b)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat tersebut, penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik serta urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada program prioritas daerah yang mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026, dalam pengukuran sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
3. Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral; dan
4. Meningkatnya Sistem Persandian Daerah.

Di mana keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan / *stakeholders* (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas / instansi terkait) serta masyarakat di Kabupaten Kutai Barat termasuk tentunya yang pasti dukungan penuh dari segenap komponen internal Diskominfo Kabupaten Kutai Barat. Uraian dan status capaian dari keempat indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel I sebagai berikut ini :

Tabel I Capaian Sasaran Strategis Dinas Kominfo Kutai Barat Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	1.500 Pemberitaan	1.946 Pemberitaan	129,73%
Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i>	10 Layanan	18 Layanan	36%
Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	9 OPD	44 OPD	93,62%
Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral	Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	350 Surat	498 Surat	142,29%

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel II sebagai berikut :

Tabel II Realisasi Anggaran 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA (Rp)
			Rp	%	
1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat	Rp. 17.959.372.858,00	15.175.137.652,00	84,50	2.784.235.206,00

Secara umum kinerja keuangan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan baik dengan persentase realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 secara global sebesar 84,50%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	20
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Capaian Kinerja	32
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	34
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021–2026	39
3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	41
3.1.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mengacu Tahun Sebelumnya	42
3.1.5 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat Terhadap LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022	43
3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	50

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	74
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	89
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94

DAFTAR TABEL

Tabel I	Capaian Sasaran Strategis Dinas Kominfo Kutai Barat Tahun 2023	iv
Tabel II	Realisasi Anggaran 2023	v
Tabel 1.1	Aset Dinas Kominfo Kubar Tahun 2023	8
Tabel 1.2	Realisasi APBD Dinas Kominfo Kubar Tahun 2023	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021–2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat	18
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat	19
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023	21
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023	32
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran Sasaran Strtegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023	33
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	36
Tabel 3.3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	39
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	41
Tabel 3.5	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya	42
Tabel 3.6	Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Terhadap LAKIP Diskominfo Tahun 2022	44
Tabel 3.7	Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022	51
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	52
Tabel 3.9	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	55
Tabel 3.10	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra	55

Tabel 3.11	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	59
Tabel 3.12	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	61
Tabel 3.13	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra	61
Tabel 3.14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	64
Tabel 3.15	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	65
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra	66
Tabel 3.17	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	68
Tabel 3.18	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	70
Tabel 3.19	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra	70
Tabel 3.20	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan	73
Tabel 3.22	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	75
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran 2023	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat (Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021)	5
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon, Pangkat dan Golongan	7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik	77
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	79
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika	81
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Seksi Statistik	84
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Seksi Persandian	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat. Peraturan Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat tersebut, penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang statistik dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya didasari dengan asas akuntabilitas yang memerlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh instansi pemerintah baik dari tingkat Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota sampai dengan perangkat daerah untuk mengetahui tingkat akuntabilitasnya. LKjIP ini disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika ke depannya.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa landasan hukum yang mendasari dalam pembuatan laporan ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
- d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
- i. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat; dan

- j. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat;
- b. Mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026;
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

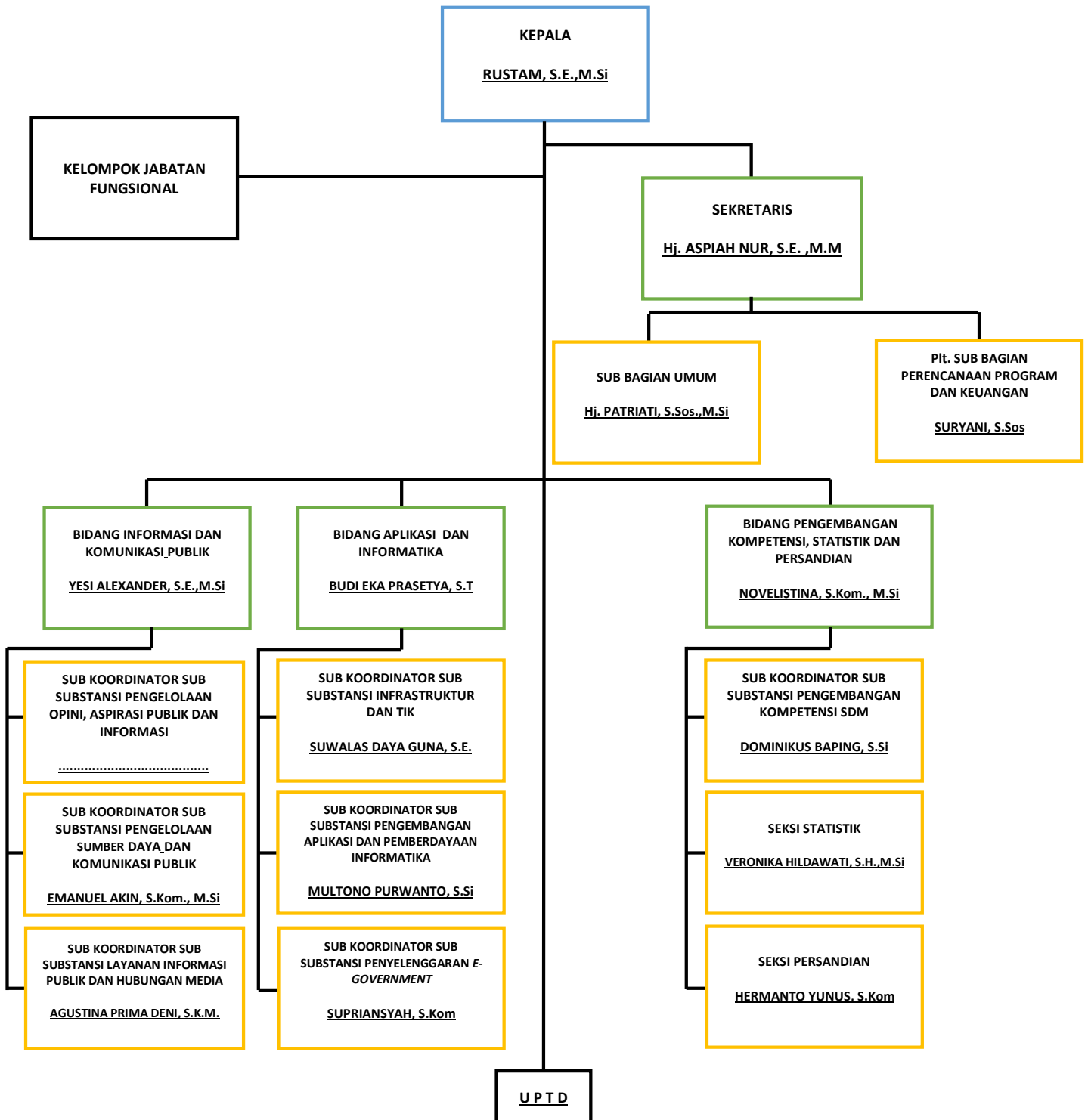
Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kedudukan tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Opini, Aspirasi Publik dan Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Infrastruktur dan TIK;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika; dan
 - 3. Seksi Penyelenggaraan *E-Government*,
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi, Statistik dan Persandian membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Statistik; dan
 - 3. Seksi Persandian,
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara skematis untuk struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :

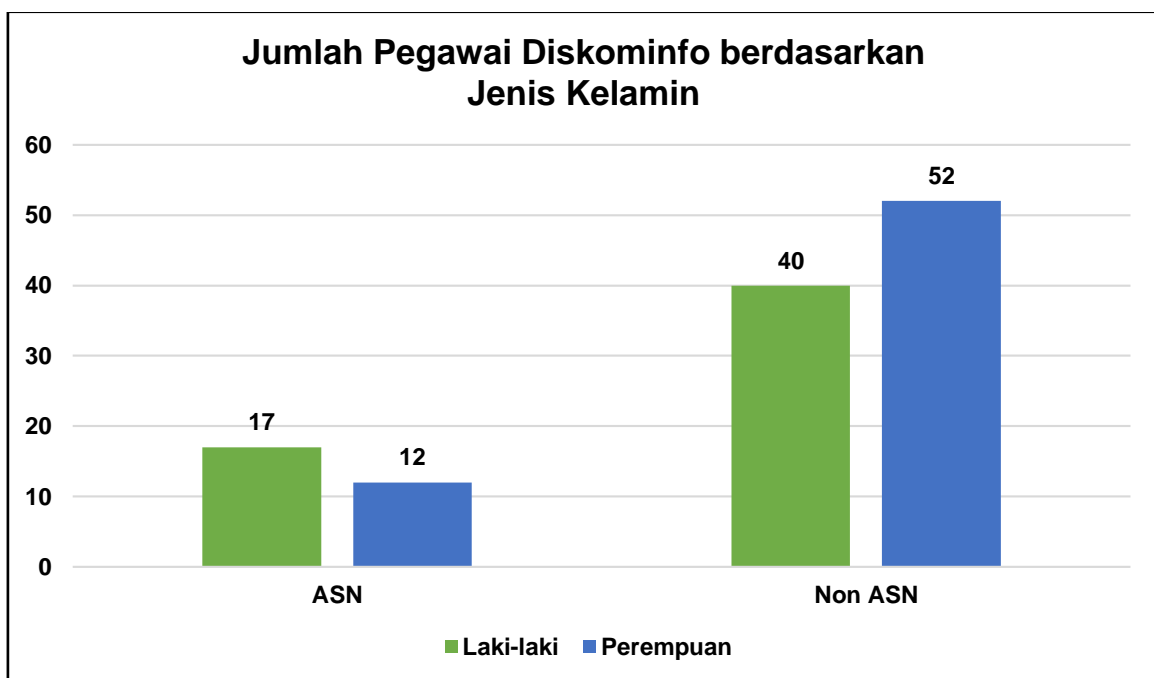
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat
(Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021)



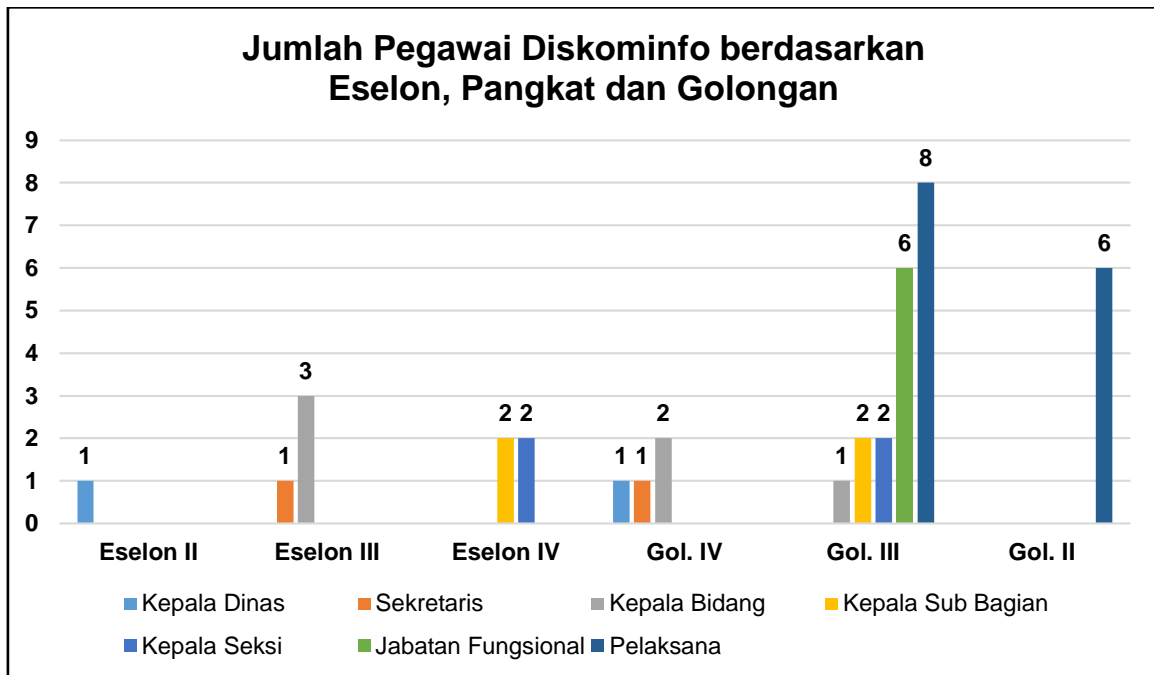
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana serta anggaran. Rincian penjabarannya diantaranya sebagai berikut :

a. Kepegawaian

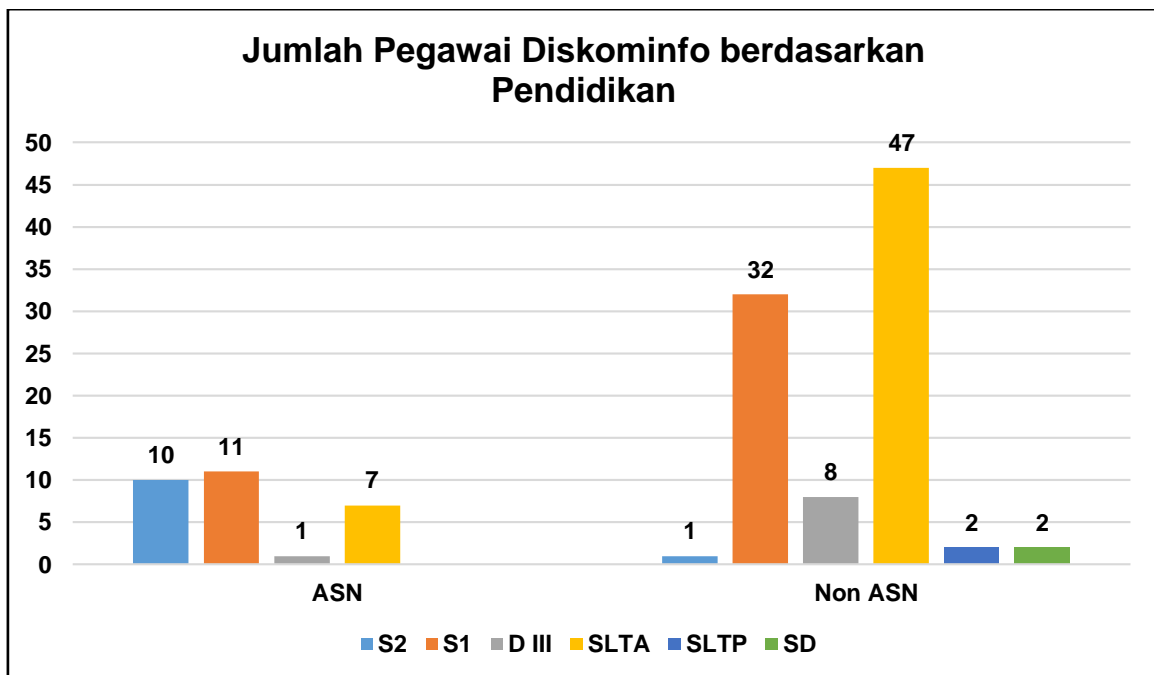
Berdasarkan tahun 2023, jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat sebanyak 121 Orang (Seratus Dua Puluh Satu) yang meliputi 29 orang berstatus ASN dan 92 orang berstatus Non ASN. Rincian SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Gambar 1.2 sampai 1.4 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon, Pangkat dan Golongan



Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan analisis beban kerja menunjukkan bahwa jumlah SDM yang dimiliki sudah mencukupi. Sedangkan ditinjau dari tingkat pendidikan sudah cukup memadai, karena didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana dan pascasarjana. Namun, dilihat dari segi kualitas SDM masih terbatas karena belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan struktural.

b. Aset Perangkat Daerah

Menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat mempunyai aset yang sebagian dalam kondisi baik, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2023 aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Aset Dinas Kominfo Kubar Tahun 2023

No	Uraian	Laporan Tahun 2023
1	2	3
A	ASET LANCAR	
	Persediaan	
B	ASET TETAP	Rp 8.429.906.226,00
	1. Tanah	
	2. Peralatan dan Mesin	Rp 8.128.044.226,00
	3. Gedung dan Bangunan	Rp 301.862.000,00
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5. Aset Tetap Lainnya	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	7. Akumulasi Penyusutan	
C	ASET LAINNYA	Rp 149.999.999,00
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
	2. Aset Tidak Berwujud	Rp 149.999.999,00
	3. Aset Lain-lain	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	

c. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat didukung dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Total anggaran tahun 2023 sebesar Rp.17.959.372.858,00 dengan realisasi sebesar 84,50% dengan jumlah Rp.15.175.137.562,00 dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Realisasi APBD Dinas Kominfo Kubar tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Pagu APBD-P 2023 (Rp.)	Pelaksanaan		
			Realisasi Keuangan (Rp.)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5	Belanja Daerah	17.959.372.858,00	15.175.137.652,00	84,50	2.784.235.206,00
5.1	Belanja Operasi	15.567.195.580,00	13.055.731.171,00	83,87	2.511.464.409,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.326.313.909,00	5.109.751.541,00	80,77	1.216.562.368,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.240.881.671,00	7.945.979.630,00	85,99	1.294.902.041,00
5.2	Belanja Modal	2.392.177.278,00	2.119.406.391,00	88,60	272.770.887,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.322.177.278,00	2.049.406.392,00	88,25	272.770.886,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	70.000.000,00	69.999.999,00	100,00	1,00
Jumlah Belanja		17.959.372.858,00	15.175.137.652,00	84,50	2.784.235.206,00

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Rencana lima tahun ke depan suatu Perangkat Daerah sangat ditentukan dari analisis isu-isu strategisnya. Analisis isu-isu strategis ini dilakukan untuk melengkapi tahap-tahap sebelumnya dalam, penyusunan Renstra OPD. Sasaran dan program pembangunan ditentukan dari identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis. Mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan yang terjadi adalah langkah dalam memperoleh isu strategis.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Kutai Barat menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang Komunikasi dan informatika diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;

6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
 8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
 9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
 10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City; dan
 11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.
- b. Bidang Statistik
- Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang Statistik diantaranya sebagai berikut :
1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
 2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
 3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah; dan
 4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.
- c. Bidang Persandian
- Permasalahan yang dihadapi pada urusan bidang Persandian diantaranya sebagai berikut :
1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi; dan
 4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan berikut :

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah;
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama; dan
- 1.6 Sistematika Penulisan.

b. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini memuat :

- 2.1 Rencana Strategis;
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023; dan
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

c. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini memuat :

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
 - 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021–2026
 - 3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
 - 3.1.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mengacu Tahun Sebelumnya
 - 3.1.5 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat Terhadap LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022
 - 3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
 - 3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

d. **BAB IV PENUTUP**

- 4.1 Kesimpulan; dan
- 4.2 Saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dan *stakeholder* terkait.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Pemaparan terkait visi dan misi serta tujuan sasaran Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat diantaranya sebagai berikut :

a. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026 adalah **“Kutai Barat SEMAKIN Adil, Mandiri dan Sejahtera, Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia”**.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat akan melaksanakan Misi Kepala Daerah pada Misi ke-4 yaitu **“Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan”**.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2016. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat untuk lebih mempersiapkan diri agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 sebanyak 4 sasaran strategis. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat disusun berdasarkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi serta berdasarkan pada sasaran strategis, dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi.

Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran tujuan dan sasaran instansi. Capaian tujuan dan sasaran Kabupaten Kutai Barat dihasilkan dari tujuan dan sasaran OPD yang telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Barat. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026

No.	Tujuan Dan Sasaran Strategis				Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi publik	Presentase penyebaran informasi publik	Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh Media Lokal & Nasional (FB, IG, Website, Youtube, Sendawar FM "Radio Media Sosial", TVRI, dan RRI) dibagi Jumlah Target Pemberitaan Media Keseluruhan dikali 100%.	Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik dan Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Peningkatan pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi	Meningkatnya aplikasi pemerintah dan publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase aplikasi layanan pemerintah dan publik yang diselenggarakan secara online	Jumlah Layanan Pemerintah & Publik yang Diselenggarakan Secara Online dibagi Jumlah OPD dikali 100%	Seksi Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika	Bidang Aplikasi Informatika
3.	Peningkatan pengelolaan informasi data statistik sektoral	Meningkatnya pengembangan data/informasi statistik sektoral	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi Jumlah OPD dikali 100%	Seksi Statistik	Bidang Pengembangan Kompetensi, Statistik dan Persandian
4.	Peningkatan sistem persandian daerah	Meningkatnya penguatan kelembagaan siber dan persandian	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	Jumlah Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah dibagi Jumlah Surat Masuk dikali 100%	Seksi Persandian	Bidang Pengembangan Kompetensi, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas telah menjelaskan mengenai formulasi perhitungan serta sumber data guna mencapai IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat selain itu pada penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan target dari IKU tersebut, adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021–2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	Presentase Penyebaran Informasi Publik	55%	55%	64%	66%	67%	69%
2.	Peningkatan pemanfaatan aplikasi dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi	Meningkatnya Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	10%	10%	20%	40%	60%	80%
3.	Peningkatan pengelolaan informasi data statistik sektoral	Meningkatnya Pengembangan Data/ Informasi Statistik Sektoral	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	19%	19%	19%	21%	21%	21%
4.	Peningkatan sistem persandian daerah	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	83%	83%	88%	92%	96%	100%

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan untuk Mencapai Tujuan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Penyebaran Informasi Publik	%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Layanan Hubungan Media
2.	Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	Peningkatan Pengelolaan Informasi Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
4.	Peningkatan Sistem Persandian Daerah	Meningkatnya Sistem Persandian Daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026 terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Pemaparan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No	Sasaran	Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RENJA PD Kabupaten				Keterangan
		1	2	3	4			K		Rp		
		16				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					Rp 12.199.242.579,00	APBD-P
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100	%		Rp 12.199.242.579,00	APBD-P
		16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%		Rp 38.790.000,00	APBD-P
		16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		Rp 12.240.000,00	APBD-P
		16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan		Rp 12.700.000,00	APBD-P
		16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan		Rp 13.850.000,00	APBD-P
		16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	%		Rp 6.182.188.909,00	APBD-P

16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang / Bulan	Bulan	Rp 6.153.993.909,00	APBD-P
16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	Rp 8.840.000,00	APBD-P
16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	2	Laporan	Rp 9.175.000,00	APBD-P
16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	Rp 10.180.000,00	APBD-P
16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal Sesuai Dengan Aturan	100	%	Rp 292.514.700,00	APBD-P
16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11	Orang	Rp 163.705.100,00	APBD-P
16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti	2	Kali	Rp 128.809.600,00	APBD-P

16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Rp 1.065.531.154,00	APBD-P
16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	Jenis	Rp 44.170.634,00	APBD-P
16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20	Jenis	Rp 14.989.400,00	APBD-P
16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengeluaran Rutin Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	Rp 33.098.900,00	APBD-P
16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Barang Cetak dan Penggandaan	5	Jenis	Rp 9.999.990,00	APBD-P
16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	4	Kali	Rp 331.189.230,00	APBD-P
16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	Kali	Rp 632.083.000,00	APBD-P
16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	Rp 1.125.268.296,00	APBD-P
16	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10	Jenis	Rp 272.601.792,00	APBD-P
16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	10	Jenis	Rp 852.666.504,00	APBD-P

16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp 3.298.208.452,00	APBD-P
16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Dokumen	Rp 988.000,00	APBD-P
16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pengeluaran Rutin Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	Rp 81.060.668,00	APBD-P
16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengeluaran Rutin Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	Rp 3.216.159.784,00	APBD-P
16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Rp 196.741.068,00	APBD-P
16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	Triwulan	Rp 41.836.600,00	APBD-P
16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	Triwulan	Rp 98.296.050,00	APBD-P

		16	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4	Triwulan	Rp	4.799.442,00	APBD-P
		16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Triwulan	Rp	11.060.595,00	APBD-P
		16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	Triwulan	Rp	31.028.000,00	APBD-P
		16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Jenis	Rp	9.720.381,00	APBD-P
		16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Rp 5.061.282.189,00	APBD-P
2	Meningkatnya Layanan Informasi dan komunikasi Publik	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	64	%	Rp	2.248.171.132,00	APBD-P
		16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi, dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasi	64	%	Rp	2.248.171.132,00	APBD-P

16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2	Dokumen	Rp	16.230.000,00	APBD-P
16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1	Dokumen	Rp	162.386.603,00	APBD-P
16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	400	Dokumen	Rp	276.621.250,00	APBD-P
16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50	Dokumen	Rp	387.082.391,00	APBD-P
16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	Dokumen	Rp	74.999.958,00	APBD-P
16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3	Layanan	Rp	1.258.238.230,00	APBD-P
16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	Dokumen	Rp	48.145.000,00	APBD-P
16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	Dokumen	Rp	24.467.700,00	APBD-P

3	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	10	%	Rp 2.813.111.057,00	APBD-P	
		16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain yang Dikelola oleh Pemerintah Kab. Kutai Barat	92	%	Rp 1.964.167.174,00	APBD-P	
		16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 106.879.000,00	APBD-P
		16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44	Unit	Rp 1.857.288.174,00	APBD-P
		16	03	2.02		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Daerah	6	%	Rp 848.943.883,00	APBD-P
		16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	Dokumen	Rp 163.585.000,00	APBD-P
		16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Unit	Rp 413.749.883,00	APBD-P

		16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1	Dokumen	Rp	138.234.000,00	APBD-P
		16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Unit	Rp	63.608.000,00	APBD-P
		16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1	Dokumen	Rp	69.767.000,00	APBD-P
		20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				Rp	233.087.790,00	APBD-P
4	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	19	%	Rp	233.087.790,00	APBD-P
		20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik Sektoral	67	%	Rp	233.087.790,00	APBD-P
		20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	Dokumen	Rp	79.401.950,00	APBD-P

		20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3	Orang	Rp 153.685.840,00	APBD-P
		21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				Rp 465.760.300,00	APBD-P
5	Meningkatnya Sistem Persandian Daerah	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	83	%	Rp 465.760.300,00	APBD-P
		21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengamanan informasi Pemerintah Daerah	100	%	Rp 373.762.800,00	APBD-P
		21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	Rp 214.189.300,00	APBD-P
		21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	Rp 159.573.500,00	APBD-P

						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Prosedur Pengamanan Informasi	100	%	Rp 91.997.500,00	APBD-P
		21	02	2.02							
		21	02	2.01	01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1	Perangkat Daerah	Rp 91.997.500,00	APBD-P
TOTAL										Rp 17.959.372.858,00	APBD-P

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka disepakati perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah dibawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagai perwujudan pencapaian kinerja secara berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021–2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	%	64
2.	Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara Online	%	20
3.	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	19
4.	Meningkatnya Sistem Persandian Daerah	Persentase Surat Sistem Elektronik Atau Aset Informasi yang Telah Di Audit Dengan Resiko Kategori Rendah	%	88

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Sasaran Strtegis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023

NO.	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		Rp. 2.213.487.035,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 555.478.372,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 555.478.372,00	APBD-P Tahun 2023
	2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.658.008.663,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.239.651.663,00	APBD-P Tahun 2023
	2	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 418.357.000,00	APBD-P Tahun 2023
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Rp. 158.485.155,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 158.485.155,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 158.485.155,00	APBD-P Tahun 2023
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Rp. 160.754.500,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 160.754.500,00	APBD-P Tahun 2023
	1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 140.503.000,00	APBD-P Tahun 2023
	2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 20.251.500,00	APBD-P Tahun 2023
TOTAL			Rp. 2.532.726.690,00	APBD-P Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran atas evaluasi kinerja sasaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Skala penilaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75%	Sedang
4	50,01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023, maka dilakukan analisis capaian kinerja yang akan dijelaskan pada sub di bawah ini.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target dan realisasi serta capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada Tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021–2026 dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023		REALISASI	FORMULASI PERHITUNGAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
						CAPAIAN (%)	RUMUS		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	Presentase Penyebaran Informasi Publik	64	%	1946	129,73%	<p>Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh Media Lokal & Nasional (FB, IG, <i>Website</i>, <i>Youtube</i>, Sendawar FM "Radio Media Sosial", TVRI & RRI) dibagi Jumlah Target Pemberitaan Media Keseluruhan (FB, IG, <i>Website</i>, <i>Youtube</i>, Sendawar FM "Radio Media Sosial", TVRI & RRI) dikali 100%.</p> <p>Realisasi (%) = $(1.946 : 1.500) \times 100\%$ = 129,73%</p>	Target sudah tercapai. Kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik sedang berlangsung. Sampai dengan triwulan IV sebanyak 1.946 pemberitaan yang telah di publikasi di media lokal dan nasional.	Kegiatan sedang berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan Kepala Daerah.
2	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	20	%	18	36,00%	<p>Jumlah Layanan Pemerintah & Publik yang Diselenggarakan Secara Online dibagi Jumlah Target Layanan dikali 100%</p> <p>Realisasi (%) = $(18 : 50) \times 100\%$ = 36,00%.</p>	Target sudah tercapai. Terdapat penambahan 1 layanan baru di dalam Aplikasi Kubar OK yakni (Layanan Usulan Sertifikat Elektronik) dari Diskominfo, sampai dengan triwulan IV tahun 2023 terdapat 18 layanan dari 6 OPD dengan target keseluruhan sebanyak 50 layanan.	Kesadaran OPD akan pentingnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, dan transparan sudah cukup tinggi namun masih perlu ditingkatkan lagi agar semua pelayanan pemerintah daerah bisa dilakukan secara <i>online</i> .

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023		REALISASI	FORMULASI PERHITUNGAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
						CAPAIAN (%)	RUMUS		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	19	%	44	93,62%	<p>Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dibagi Jumlah OPD dikali 100%</p> <p>Realisasi (%) $= (44 : 47) \times 100\%$ $= 93,62\%$</p>	<p>Target sudah tercapai. Ketersediaan data statistik sektoral yang dihimpun dari Perangkat Daerah terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 12 OPD, sampai dengan triwulan III tahun 2023 mengalami penambahan 32 OPD sehingga total ketersediaan data yang dihimpun OPD sebanyak 44 OPD. Hal itu terjadi dikarenakan pemahaman OPD tentang pentingnya Data Statistik Sektoral dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi namun masih terdapat 3 OPD yang belum memberikan respon terkait permintaan data tersebut.</p>	<p>Akan lebih dimaksimalkan lagi kegiatan statistik sektoral melalui sosialisasi berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Perbup No. 31 Tahun 2021</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023		REALISASI	FORMULASI PERHITUNGAN		PERMASALAHAN	SOLUSI
						CAPAIAN (%)	RUMUS		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	88	%	498	142,29%	<p>Jumlah Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah / Jumlah Surat Masuk * 100%</p> <p>Realisasi (%) $= (498 : 350) \times 100\%$ $= 142,29\%$</p>	Target sudah tercapai. Jumlah surat masuk yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sebanyak 498 surat yang terdiri dari surat masuk lokal dan nasional.	Menyesuaikan dengan Jumlah Surat Masuk dari Kementerian, Lembaga Negara Republik Indonesia dan Prov. Kaltim ke Diskominfo Kutai Barat Tahun 2023 dan Jumlah Surat Masuk Melalui Radio Single Side Band (SSB) atau Handy Talky (HT) dan Aplikasi WhatsApp dari OPD ke Diskominfo Kutai Barat Tahun 2023.
Jumlah Capaian						100,41%			

Berdasarkan data capaian pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **100,4%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, dari rata-rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2021–2026.

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021–2026

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga realisasi kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021–2026. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rincian realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun		(% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023 $7 = (6-5)/5 * 100\%$)	Keterangan
				2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	%	105,41%	129,73%	23,07	Peningkatan
2	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i>	%	14,58%	36,00%	146,91	Peningkatan
3	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	25,00%	93,62%	274,48	Peningkatan
4	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase Surat Sistem Elektronik Atau Aset Informasi yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah	%	116,80%	142,29%	21,82	Peningkatan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2023 sebagai tahun ketiga realisasi kinerja pada perencanaan jangka menengah dengan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kerjanya memiliki tingkat kemajuan yang tinggi apabila disandingkan dengan target kinerja akhir tahun target jangka menengah Rencana Strategis. Adapun tingkat kemajuan dari setiap sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Penyebaran Informasi Publik. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada tahun lalu yakni tahun 2022 adalah 105,41% dan capaian tahun 2023 sebesar 129,73%. Jika dibandingkan kenaikan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 peningkatan sebesar 23,07% dan capaian pada tahun 2023 adalah 129,73% dari target kinerja sebesar 64%.

2. Sasaran : Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online*

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online*. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada tahun lalu yakni tahun 2022 adalah 14,58% dan capaian tahun 2023 sebesar 36,00%. Jika dibandingkan kenaikan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 peningkatan sebesar 146,91% dan capaian pada tahun 2023 adalah 36,00% dari target kinerja sebesar 20%.

3. Sasaran : Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada tahun lalu yakni tahun 2022 adalah 25% dan capaian tahun 2023 sebesar 93,62%. Jika dibandingkan kenaikan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 peningkatan sebesar 274,48% dan capaian pada tahun 2023 adalah 93,62% dari target kinerja sebesar 19%.

4. Sasaran : Meningkatkan Sistem Persandian Daerah

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Persentase Surat Sistem Elektronik Atau Aset Informasi yang Telah Diaudit Dengan Resiko Kategori Rendah. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada tahun lalu yakni tahun 2022 adalah 116,80% dan capaian tahun 2023 sebesar 142,29%. Jika dibandingkan kenaikan nilai dari tahun 2022 ke tahun 2023 peningkatan sebesar 21,82% dan capaian pada tahun 2023 adalah 142,29% dari target kinerja sebesar 88%.

3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2023 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	Persentase Penyebaran Informasi Publik	%	69	129,73	188,01
2	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan Secara <i>Online</i>	%	80	36,00	45
3	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	21	93,62	445,81
4	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	100	142,29	142,29

Berdasarkan pada Tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2023 sebagai tahun ketiga realisasi kinerja pada perencanaan jangka menengah dengan 4 (empat) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kerjanya memiliki tingkat kemajuan yang tinggi apabila disandingkan dengan target kinerja akhir tahun target

jangka menengah Rencana Strategis. Adapun penjabarkan tingkat kemajuan dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Presentase Penyebaran Informasi Publik dengan tingkat kemajuan sebesar 188,01%;
2. Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan Secara *Online* dengan tingkat kemajuan sebesar 45%;
3. Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tingkat kemajuan sebesar 445,81%; dan
4. Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah dengan tingkat kemajuan sebesar 142,29%.

3.1.4 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Mengacu Tahun Sebelumnya

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar 64,73 yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

Nilai akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen evaluasi SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2022	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7-6)	
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,64	24,02	24,58	22,68	-1,9	Menurun ↓
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	15,64	12,50	17,20	25,60	8,4	Meningkat ↑
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,65	9,19	10,80	10,95	0,15	Meningkat ↑
4.	Evaluasi Internal	10,00	7,00	4,29	5,42	5,50	0,08	Meningkat ↑
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100,00	60,18	60,63	65,00	64,73	-0,27	Menurun ↓
Kategori Penilaian			B	B	B	B	Baik	

Berdasarkan data di atas, perbandingan dengan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun 2021 mendapat nilai 65,00 (Enam Puluh Lima) di mana hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **0,27 (NoI Koma Dua Puluh Tujuh)** dengan nilai **64,73 (Enam Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Tiga)** dengan predikat penilaian **Baik (Baik)**.

3.1.5 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Oleh Inspektorat Terhadap LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP tahun 2022, berikut rekomendasi dan tindak lanjut yang diberikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika agar melakukan perbaikan yang dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Terhadap LAKIP Diskominfo Tahun 2022

No.	Rekomendasi 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen Perencanaan Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub komponen dengan uraian sebagai berikut :				
a.	Rencana Aksi yang dibuat belum menyajikan data dukung berupa Laporan Monitoring Kegiatan dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi.	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan internal Diskominfo yang akan didukung dengan laporan tertulis hasil MONEV dengan rencana aksi berbentuk RTPK.	September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Sekretaris Diskominfo
b.	Dokumen Perencanaan Kinerja belum di <i>upload</i> ke <i>website</i> Pemda maupun OPD yang dapat diakses oleh Publik sebagai bentuk transparansi atas informasi yang layak diketahui oleh publik.	Meng- <i>upload</i> dokumen Perencanaan Kinerja Diskominfo ke <i>website</i> Pemda maupun OPD agar publik dapat mengakses informasi terkait kinerja Diskominfo sebagai bentuk transparansi informasi kepada Publik di Kutai Barat. Dengan rencana aksi : 1) <i>Cascading</i> di level program; 2) Pohon Kinerja, Renja, Renstra, PK, IKU dan Matrik, RTPK di level sub kegiatan; dan 3) Kualitas KAK dan Inovasi yang akan dilaksanakan.	Oktober Tahun 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Bidang APTIKA

No.	Rekomendasi 2022		Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6
	c.	Sasaran antar Dokumen Perencanaan belum selaras.	Melakukan Evaluasi kembali terhadap Dokumen Perencanaan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Tinjau Ulang Seluruh Dokumen Perencanaan; 2) Koordinasi Tim Perencanaan; 3) Identifikasi Kesenjangan; 4) Prioritaskan dan Selaraskan; 5) Komunikasikan dan Koordinasikan; 6) Rencanakan Tindakan Perbaikan; 7) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan; dan 8) Melakukan Pelaporan dan Transparansi.	September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Dinas Diskominfo
2.	Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen Pengukuran Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub komponen dengan uraian sebagai berikut :					
	a.	Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> terhadap pegawai dan pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	Memberikan <i>reward</i> terhadap kegiatan yang dalam pelaksanaannya telah mencapai dan melampaui target yang telah direncanakan dan bisa melakukan efisiensi anggaran dengan <i>di-support</i> BAPPEDA melalui RTPK/bulan, Evaluasi Renja/TW, di Dinas penilaian (<i>REWARD</i> dan <i>PUNISHMENT</i>) dari capaian kinerja terbaik misal : Piagam (dokumentasi).	27 September 2023	Triwulan III Tahun 2023	Tim Monev
	b.	Informasi kinerja cukup dapat diandalkan karena telah terdapat pedoman/SOP Pengukuran kinerja dan SOP mekanisme pengumpulan data kinerja, namun belum memuat langkah-langkah yang dilakukan bila terdapat kesalahan terhadap pengumpulan data.	Melakukan revisi terhadap pedoman/SOP pengukuran kinerja dan menambahkan langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut : 1) Melakukan Identifikasi Kesalahan; 2) Verifikasi Kesalahan; 3) Menentukan Akar Permasalahan; 4) Melakukan Koreksi Data; 5) Pelaporan Kesalahan; 6) Analisis Penyebab Kesalahan/Masalah; 7) Lakukan Revisi SOP; 8) Lakukan Pelatihan dan Edukasi; 9) Melakukan Pengawasan dan Pemantauan; dan 10) Kontinu Monitoring dan Evaluasi	27 September 2023	Triwulan III Tahun 2023	Tim Monev

No.	Rekomendasi 2022		Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6
	c.	Pengumpulan data kinerja internal dan Pengukuran Kinerja masih menggunakan Aplikasi <i>MS Excel</i> belum memanfaatkan Teknologi Informasi berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD.	Membuat Inovasi dalam proses Monitoring dan Evaluasi yang digunakan sebagai wadah pengumpulan data kinerja dan data pengukuran kinerja yang bisa diakses Internal DISKOMINFO (dalam bentuk Link <i>Googledrive</i>). Di mana tindak lanjut pengendalian akan dproses di BAPPEDA melalui aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Kinerja TW 3 dan TW 4.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Kabid APTIKA
3.	Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen Pelaporan Kinerja yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub komponen dengan uraian sebagai berikut :					
	a.	Pelaporan kinerja telah disusun sesuai dengan standar sistematika penyusunan Pelaporan Kinerja, namun secara substansi penyajian Pelaporan Kinerja belum menyajikan :				
		1) Analisis capaian kinerja belum menuangkan perbandingan target dan realisasi Tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.	Melakukan analisis kembali terhadap capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mengukur perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, dengan mengambil langkah sebagai berikut : a) Identifikasi target tahun ini yakni 2022 dan 2023; b) Kumpulkan data realisasi tahun ini yakni 2022 dan 2023; c) Kumpulkan data tahun-tahun sebelumnya; d) Lakukan Perbandingan Data; e) Lakukan Analisis Tren; f) Mencari Penyebab Perbedaan; g) Berikan Rekomendasi dan Tindakan; dan h) Serta dokumentasi.	27 September 2023	Triwulan III Tahun 2023	Tim Monev

No.	Rekomendasi 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
	2) Pelaporan Kinerja belum menuangkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta solusi alternative yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis.	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen Pelaporan Kinerja dengan menarasikan lebih detail/rinci terkait analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan menjelaskan solusi alternatif yang telah dilakukan untuk mendukung keberhasilan dan solusi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan terhadap ketercapaian masing - masing sasaran strategis.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Tim Monev
	3) Bab IV LKJiP belum menuangkan langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang.	Melakukan perbaikan/penyempurnaan Dokumen LKJiP pada Bab IV dengan menuangkan lebih konkrit terkait langkah- langkah perbaikan apa saja yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, langkah yang bisa dilakukan sebagai berikut : a) Tinjau Data Kinerja Terkini; b) Identifikasi Kelemahan atau Tantangan; c) Kaitkan dengan Sasaran Strategis; d) Prioritaskan Perbaikan; e) Tentukan Tanggung Jawab; f) Tentukan Batas Waktu; g) Rencanakan Sumber Daya; h) Pengawasan dan Evaluasi; i) Melibatkan Pihak Terkait; dan j) Lakukan Komunikasi dan Dokumentasi.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Tim Monev

No.	Rekomendasi 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	
1	2	3	4	5	6	
	b.	Dokumen Pelaporan Kinerja agar di <i>Upload</i> ke <i>website</i> Pemda maupun <i>website</i> OPD yang dapat diakses oleh Publik sebagai bentuk transparansi atas informasi yang layak diketahui oleh publik.	Meng- <i>Upload</i> Dokumen Perencanaan Kinerja Diskominfo ke <i>website</i> Pemda maupun OPD agar publik dapat mengakses informasi terkait kinerja Diskominfo sebagai bentuk transparansi informasi kepada Publik di Kutai Barat.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Kabid APTIKA
	c.	Agar Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkala per triwulan bukan hanya per tahun sebagai bahan reviu untuk perbaikan kedepan.	Melakukan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja secara berkala per triwulan.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
4.	Melakukan perbaikan dan melengkapi kekurangan data terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum memperoleh nilai penuh untuk sub komponen dengan uraian sebagai berikut :					
	a.	Agar membuat Pedoman Evaluasi Internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas dilingkungan Diskominfo.	Membuat SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Evaluasi Internal DISKOMINFO	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Tim Monev
	b.	Agar melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja diseluruh unit dan dilakukan secara berjenjang, dilaksanakan per triwulan oleh SDM Evaluator yang memadai yang diambil dari masing-masing bidang yang dibuat dalam Surat Keputusan Pimpinan OPD dan telah mengikuti Bimtek / Sosialisasi, Pelatihan dll terkait Evaluasi AKIP.	Diterbitkannya SK TIM EVALUATOR sebagai dasar dilakukannya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal di Diskominfo.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Dinas dan Seluruh <i>Stakeholder</i> di lingkungan Dinas Kominfo

No.	Rekomendasi 2022		Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	2		3	4	5	6
	c.	Agar Pemanfaatan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi dimanfaatkan sebagai perbaikan dan peningkatan kinerja (Notulen/Laporan Evaluasi Kinerja dari Rapat -rapat internal yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan satuan kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja).	Mengarsipkan dengan baik atas segala dokumen yang menjadi bukti telah ditindaklanjutinya seluruh Rekomendasi Perbaikan Kinerja dari hasil Evaluasi SAKIP, baik itu dalam bentuk Notulen Rapat yang berisi Arahan dan Rekomendasi Perbaikan kedepan oleh Pimpinan OPD dan Dokumentasi pelaksanaan rapat, sebagai <i>Evidence</i> Laporan SAKIP pada tahun mendatang.	27 September 2023	Triwulan IV Tahun 2023	Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Berdasarkan hasil analisis pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran, maka diperoleh hasil yaitu sebanyak 4 (empat) sasaran yang ada memperoleh rata-rata tingkat keberhasilan di atas 100% dengan kategori **Sangat Tinggi** (nilai > 100).

Berdasarkan hasil analisis perhitungan sasaran dan indikator kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan guna meningkatkan kinerja organisasi. **Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 sebesar 100,41% atau termasuk katagori “Sangat Tinggi”.**

Capaian ini didapat berdasarkan penghitungan dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator, melihat hasil capaian kinerja yang sangat tinggi ini menandakan kinerja yang sangat tinggi. Namun akan menjadi bahan evaluasi pada indikator dan target di mana ditemukan capaian yang jauh melebihi target yang bisa terjadi karena kesalahan dalam menentukan target yang terlalu rendah sehingga pada saat dilakukan pengukuran kinerja didapatkan realisasi yang jauh melebihi target.

Berdasarkan capaian tersebut diuraikan secara rinci analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada penjelasan capaian indikator setiap sasaran.

Pencapaian 4 (empat) indikator sasaran yang pencapaiannya melampaui target sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan penghitungan pengukuran kinerja dianggap **Sangat Tinggi**.

Ikhtisar capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA				
					Sangat Tinggi (90,01% ≤ 100%)	Tinggi (75,01 % ≤ 90%)	Sedang (65,01% ≤ 75%)	Rendah (50,01% ≤ 65%)	Sangat Rendah (≤ 50%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	Presentase Penyebaran Informasi Publik	64%	129,73%	√				
2	Meningkatnya pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	20%	36,00%					√
3	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	19%	93,62%	√				
4	Meningkatnya sistem persandian daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	88%	142,29%	√				

Berdasarkan data pada Tabel di atas, definisi dari masing–masing sasaran strategis serta penyebab keberhasilan atau kegagalan dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator **Persentase Penyebaran Informasi Publik** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada proses melakukan pengukuran dan evaluasi, perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Presentase Penyebaran Informasi Publik	Persen (%)	64%	1.946 pemberitaan	129,73%%	Sangat Tinggi
Tingkat Keberhasilan					129,73%	Sangat Tinggi

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 1 dapat disimpulkan yaitu di mana realisasi dan capaian indikator kinerja terealisasi dengan kategori **Sangat Tinggi** (Nilai 90,01% ≤ 100%). Dalam pencapaian sasaran 1 tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

Formulasi Perhitungan
Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh Media Lokal dan Nasional (FB, IG, <i>Website</i> , <i>Youtube</i> , <i>Sendawar FM</i> "Radio Media Sosial", TVRI, RRI) dibagi Jumlah Target Pemberitaan Media Keseluruhan dikali 100%

Dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan formulasi perhitungan tersebut berikut lampiran data-data pendukung dan formulasi perhitungannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh media Lokal (*Facebook, Instagram, Youtube, Radio Media Sosial, Website*) sebanyak **1.564** Pemberitaan;
- 2) Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh media Nasional (TVRI & RRI) sebanyak **136** Pemberitaan;
- 3) Jumlah Pemberitaan yang dirilis oleh media berita tulis *online*, koran, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan tayangan TV swasta sebanyak **246** Pemberitaan;
- 4) Jumlah Pemberitaan Media Keseluruhan yaitu
 $= 1.564 + 136 + 246$
 $=$ **1.946** Pemberitaan;
- 5) Jumlah Target Pemberitaan di Tahun 2023 sebanyak 1.500 Pemberitaan terdiri dari 799 Target Pemberitaan.

Berdasarkan data pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Penyebaran Informasi Publik terealisasi sebesar 129,73% dari target 64% dengan capaian sebesar 1.946 pemberitaan. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan jumlah pemberitaan yang di rilis di media lokal dan nasional dalam periode 1 tahun. Media lokal adalah media yang dikelola langsung oleh Diskominfo sedangkan media nasional adalah media yang dikelola oleh pihak ke tiga. Secara detail klasifikasi dari media lokal dan nasional iyalah sebagai berikut :

- 1) Media Lokal yaitu :
 - a) *Facebook*;
 - b) *Instagram*;
 - c) Sendawar Radio “Radio Media Sosial”;
 - d) *Youtube*; dan
 - e) *Website*.
- 2) Media Nasional yaitu :
 - a) TVRI; dan
 - b) RRI.

- 3) Media berita tulis *online*, koran, Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan tayangan TV swasta, yaitu :
- a) PT Duta Manuntung / Kaltim Post;
 - b) PT Heaptalk Media Indonesia / Heaptalk;
 - c) PT Citra Media Khatulistiwa / Liputan 6;
 - d) PT Mednow Digital Bersama / Kaltim Now;
 - e) PT Kaltimku Media Kita Grup / Info Kubar;
 - f) PT Media Bangun Bersama / Koran Kaltim;
 - g) PT Media Literasi Khatulistiwa / *Sea Today*;
 - h) PT Media Televisi Indonesia / Metro TV;
 - i) PT Metro Naufal Nabil Bersaudara / *Metro News*;
 - j) PT Mahakam Media Grafika / Tribun Kaltim;
 - k) PT Portal Interkoneksi Nusantara / Siber Kaltim;
 - l) PT Media Etam Mandiri / Kaltim Etam;
 - m) PT Generasi Media Utama / *Borneo Flash*;
 - n) PT Viva Borneo Mediatama / Viva Borneo;
 - o) PT Media Swara Kaltim / Swara Kaltim;
 - p) PT Duta Media Kaltim Press / Samarinda Pos;
 - q) PT Jurnal Media Nasional / Harian Jurnal;
 - r) PT Pena Utama Media / Sorot Nuswontoro Media; dan
 - s) PT Media Anugerah Sendawar / Warta Kubar.

- b.** Membandingkan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Seperti kita ketahui sebelumnya, dalam proses melakukan pengukuran dan evaluasi perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan
			2022	2023	
1	Presentase Penyebaran Informasi Publik	64%	105,41	129,73	23,07

Berdasarkan data di atas terkait capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dari sasaran Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Penyebaran Informasi Publik mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu di mana pada tahun 2022 realisasi sebesar 105,41% dan tahun 2023 sebesar 129,73%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Tahun Terakhir

Perbandingan data adalah suatu langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pengukuran kinerja khususnya capaian kinerja dengan mengacu pada target RPJMD atau Renstra SKPD. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa target dokumen Renstra Dinas Kominfo dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Presentase Penyebaran Informasi Publik	64%	69	129,73	188,01%

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021–2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, di mana indikator Presentase Penyebaran Informasi Publik telah melampaui target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 69%.

Dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Namun hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan target kinerja pada sasaran tersebut pada saat *review* Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase Penyebaran Informasi Publik pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari yang ditargetkan. Keberhasilan berdasarkan analisis hasil jumlah pemberitaan kegiatan pemerintah daerah yang banyak serta masih dipublikasikan di media lokal pada tahun 2023. Sedangkan pada media nasional berdasarkan analisis hasil pemberitaan kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasi di media nasional juga mencapai target.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik antara lain sebagai berikut :

1) Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dari pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik antara lain sebagai berikut :

a) Media Lokal

- i. Sumber Daya Manusia dalam pengumpulan berita ditunjang oleh tim peliput Diskominfo secara maksimal namun masih perlu dilakukan peningkatan SDM melalui pelatihan/diklat; dan

- ii. Diskominfo menggunakan media lokal seperti *Facebook*, *Instagram*, *Website*, *Youtube* dan Radio Media Sosial “Radio Sendawar” untuk meningkatkan cakupan layanan informasi dan komunikasi publik secara maksimal untuk penyebarluasan informasi.
- b) Media Nasional
- i. Diskominfo menggunakan media nasional (TVRI & RRI) untuk meningkatkan cakupan layanan informasi dan komunikasi publik secara maksimal untuk penyebarluasan informasi; dan
 - ii. Diskominfo melakukan kerjasama kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah untuk memfasilitasi dalam perumusan /penyusunan regulasi/MoU/PKS kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik sehingga Terlaksananya Kerjasama Pemberitaan Melalui Media Elektronik (TVRI & RRI). Apabila telah terselenggaranya perjanjian kerjasama tersebut diatas maka kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berkaitan dengan publikasi tentang informasi-informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang akan dipublikasikan kepada masyarakat sampai ke pelosok baik dalam dan luar daerah dapat terlaksana dan terarah pada tujuan yang telah direncanakan di tahun 2023.

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

2) Kendala-kendala dalam Mencapai Target yang Telah Ditentukan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditentukan pada sasaran Meningkatnya Informasi dan Komunikasi Publik antara lain sebagai berikut :

- a) Media Lokal
 - i. Belum adanya transportasi khusus untuk menunjang tim peliput di lapangan; dan
 - ii. Perlunya ditambah peralatan media untuk menunjang hasil peliputan di lapangan.

b) Media Nasional

Kerjasama dengan pihak ketiga belum sepenuhnya mencapai target pemberitaan di tahun 2023, hal ini dikarenakan pembiayaan kerjasama yang harus juga dibagi kepada pihak ketiga lainnya dalam hal ini Berita Tulis *Online*, Koran ILM, Tayangan TV Swasta. Beberapa kendala utama target pemberitaan di media Nasional yaitu di mana RRI dengan anggaran yang ada mendapat volume pemberitaan sebanyak 38 kali dimana ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 69 kali. Tetapi berbeda dengan pihak TVRI, target pemberitaan yang tetapkan telah mencapai bahkan melewati di mana dengan anggaran tersebut mendapat volume pemberitaan sebanyak 88 kali dimana ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 49 kali.

3) Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala yang ada diantaranya sebagai berikut :

a) Media Lokal

- i. Menggunakan kendaraan operasional dan kendaraan pribadi; dan
- ii. Memaksimalkan hasil liputan dengan peralatan yang tersedia

b) Media Nasional

Jumlah pemberitaan TVRI dan RRI menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati baik dalam hal penentuan materi, jadwal, dan tarif/harga program acara pemberitaan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran **2 : Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi** dengan indikator **Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara Online** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

a. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada proses melakukan pengukuran dan evaluasi, perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
2	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan Secara Online	Persen (%)	20%	18 layanan	36%	Melampaui Target (MT)
Tingkat Keberhasilan					36%	Melampaui Target (MT)

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 2 dapat disimpulkan bahwa realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Terealisasi dengan kategori Melampaui Target (MT) Nilai >100. Dalam pencapaian sasaran 2 tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

Formulasi Perhitungan
Jumlah Layanan Pemerintah & Publik yang Diselenggarakan Secara <i>Online</i> dibagi Jumlah OPD dikali 100%

Dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan formulasi perhitungan tersebut berikut lampiran data-data pendukung dan formulasi perhitungannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah Layanan Pemerintah yang diselenggarakan secara online pada aplikasi Kubar OK sampai dengan tahun 2022 sebanyak 18 Layanan terdiri dari 6 OPD (18%).
- 2) Target OPD yang ada di dalam Aplikasi Kubar OK sebanyak 6 OPD (20%) di tahun 2023. Jumlah OPD di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 47 OPD.

Berdasarkan tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* terealisasi sebesar 36% dari target 20% dengan capaian sebesar 18 layanan. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan *update* jumlah Perangkat Daerah yang memiliki layanan di dalam aplikasi Kubar OK.

Aplikasi 'Kubar Ok' ini dibangun sebagai salah satu bagian dari implementasi proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional angkatan XII yang diikuti oleh Kepala Diskominfo Kutai Barat dan Kepala Disdagkop Kutai Barat. Aplikasi 'Kubar Ok' pada tahun 2020 diprioritaskan pada 23 layanan Disdukcapil dan "Kubar Tuk" (aplikasi Tera ukur) pada Disdagkop Kutai Barat.

Nantinya akan ada lagi layanan dari Perangkat daerah yang ada di Kutai Barat, sehingga semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pemerintah melalui satu aplikasi untuk semua layanan masyarakat yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Kutai Barat.

b. Membandingkan ntara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Seperti kita ketahui sebelumnya, dalam proses melakukan pengukuran dan evaluasi perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan
			2022	2023	
1	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan Secara Online	20%	14,58	36	21,42

Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dari sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* mengalami peningkatan di mana pada tahun 2022 realisasi sebesar 14,58% dan tahun 2023 sebesar 36%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Tahun Terakhir

Perbandingan data adalah suatu langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pengukuran kinerja khususnya capaian kinerja dengan mengacu pada target RPJMD atau Renstra SKPD. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa target dokumen Renstra Dinas Kominfo dapat dilihat pada Tabel 3.13 sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan target dokumen RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan Secara <i>Online</i>	20%	80	36	45%

Berdasarkan data di atas, dengan melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara Online yang telah mencapai angka sebesar 36% dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dengan indikator Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online* pada tahun 2023 telah melebihi yang ditargetkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut :

1) Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dari pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi antara lain sebagai berikut :

- a) Pengembangan fitur di aplikasi Kubar OK telah selesai dilakukan/dikerjakan sehingga penambahan OPD pada aplikasi dapat dilakukan kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya;
- b) Adanya peningkatan kesadaran OPD untuk meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan layanan secara daring/*online*; dan
- c) Meningkatnya permintaan masyarakat dalam penyediaan layanan secara daring/*online* sehingga mendorong OPD agar dapat memenuhi permintaan masyarakat tersebut.

- 2) Kendala-kendala dalam Mencapai Target yang Telah Ditentukan

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan / kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

 - a) Respon OPD terhadap pelaksanaan layanan daring/*online* masih kurang;
 - b) Kurangnya kesiapan Sumber Daya Manusia (Operator) dalam pelaksanaan pelayanan daring/*online*;
 - c) Kurangnya Perangkat *Personal Computer* (PC) pada OPD yang mendukung pelayanan daring/*online*.
- 3) Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

 - a) Diskominfo telah melakukan *roadshow*/sosialisasi pada setiap OPD; dan
 - b) Diskominfo menyiapkan wadah untuk konsultasi (Operator) jika terdapat kendala-kendal yang butuh penjelasan secara intens.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran **3 : Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral** dengan indikator **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada proses melakukan pengukuran dan evaluasi, perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
3	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen (%)	19%	44 OPD	93,62	Melampaui Target (MT)
Tingkat Keberhasilan					93,62%	Melampaui Target (MT)

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 3 dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Terealisasi dengan kategori Melampaui Target (MT) Nilai > 100. Dalam pencapaian sasaran 3 tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

Formulasi Perhitungan	
Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah <u>dibagi</u> Jumlah OPD <u>dikali</u> 100%	

Dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan formulasi perhitungan tersebut berikut lampiran data-data pendukung dan formulasi perhitungannya diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jumlah OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan tahun 2023 sebanyak 44 OPD (93,62%);
- 2) Target OPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 sebanyak 9 OPD (19%); dan
- 3) Jumlah OPD di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 47 OPD.

Berdasarkan data tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 93,62% dari target 19% dengan capaian sebesar 44 OPD. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan pada jumlah OPD yang sudah melakukan penginputan data statistik sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- b. Membandingkan ntara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Seperti kita ketahui sebelumnya, dalam proses melakukan pengukuran dan evaluasi perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbadingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan
			2022	2023	
1	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	19%	25,00	93,62	68,62%

Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dari sasaran Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 25% dan pada tahun 2023 sebesar 93,62%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Tahun Terakhir

Perbandingan data adalah suatu langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pengukuran kinerja khususnya capaian kinerja dengan mengacu pada target RPJMD atau Renstra SKPD. Perbadingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa target dokumen Renstra Dinas Kominfo dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	19%	21	93,62	445,81%

Dengan melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah telah melampaui target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 21% dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Namun hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan target kinerja pada sasaran tersebut pada saat *Review Renstra*.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 telah melebihi yang ditargetkan.

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral antara lain :

1) Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dari pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral antara lain sebagai berikut :

- a) Tersedianya sarana dan prasarana seperti SDM dan portal google site link <https://site.google.com/view/statistik-kominfokutabar/beranda> dan website Bapak Data (Bagi Pakai Data) <https://data.kutaibaratkab.go.id/> dan <https://bapakdata.kutaibaratkab.go.id/> untuk pengisian data dan akses Interoperabilitas data dari OPD maupun masyarakat; dan
 - b) Pelaksanaan *roadshow*/sosialisasi ke OPD akan pentingnya pelaksanaan dan pengisian portal data statistik sektoral.
- 2) Kendala-kendala dalam Mencapai Target yang Telah Ditentukan
- Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :
- a) Respon OPD yang masih belum maksimal;
 - b) Waktu pelaksanaan/jadwal yang tidak bisa terlaksana tepat waktu disebabkan adanya kendala teknis dan pejabat OPD yang sedang melaksanakan tugas lain/kegiatan di luar daerah; dan
 - c) Jaringan internet yang kurang stabil sehingga data tidak dapat diinput secara maksimal oleh OPD.
- 3) Alternatif Solusi
- Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain sebagai berikut :
- a) Diskominfo telah melakukan *roadshow*/sosialisasi pada setiap OPD;
 - b) Jadwal *roadshow*/sosialisasi tidak berjalan sesuai jadwal dikarenakan terdapat pejabat yang tidak sedang ditempat sehingga diskominfo melakukan penjadwalan ulang sembari berkoordinasi dengan opd terkait; dan
 - c) Diskominfo telah memastikan kembali data-data yang diinput oleh setiap operator di OPD benar-benar terinput.

4. Sasaran Strategis : Meningkatnya Sistem Persandian Daerah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran **4 : Meningkatnya**

Sistem Persandian Daerah dengan indikator **Persentase Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah** dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

a. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada proses melakukan pengukuran dan evaluasi, perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian (%)	Kategori
			Target	Realisasi		
4	Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah	Persen (%)	88%	498 surat	142,29	Melampaui Target (MT)
Tingkat Keberhasilan					142,29%	Melampaui Target (MT)

Interpretasi kategori pengukuran Indikator Kinerja sasaran 4 dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Terealisasi dengan kategori Melampaui Target (MT) Nilai > 100. Dalam pencapaian sasaran 4 tersebut dapat dihitung dengan rumus berikut :

Formulasi Perhitungan
<p>Jumlah Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah <u>dibagi</u> Jumlah Target Surat Masuk <u>dikali</u> 100%</p>

Dalam melakukan pengukuran kinerja berdasarkan formulasi perhitungan tersebut berikut lampiran data-data pendukung dan formulasi perhitungannya sebagai berikut :

- 1) Jumlah surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah pada tahun 2023 sebanyak 498 surat.
- 2) Target surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah pada tahun 2022 sebanyak 350 surat.

Penjelasan maksud dari klasifikasi jenis surat berdasarkan keamanan isinya diantaranya sebagai berikut :

- 1) **Surat Rendah (Biasa/Penting)** adalah surat yang isinya hanya berupa masalah biasa dan bukan rahasia. Surat biasa ini menyampaikan sebuah informasi umum, yang boleh diketahui secara umum;
- 2) **Surat Sedang (Rahasia)** adalah surat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan penting, yang hanya diketahui oleh pejabat yang berhak menerima surat tersebut; dan
- 3) **Surat Tinggi (Sangat Rahasia)** adalah surat yang berupa dokumen atau naskah rahasia. Surat sangat rahasia ini memiliki fungsi untuk menyampaikan sebuah dokumen penting yang berhubungan dengan negara. Surat yang sangat rahasia ini memiliki kode SR atau SRHS, yang memiliki arti surat sangat rahasia.

Berdasarkan data pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah dengan indikator Persentase Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah terealisasi sebesar 142,29% dari target 88% dengan capaian sebesar 498 surat. Pencapaian dari sasaran tersebut berdasarkan pada jumlah surat masuk yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah oleh Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- b. Membandingkan ntara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Seperti kita ketahui sebelumnya, dalam proses melakukan pengukuran dan evaluasi perlu adanya bahan perbandingan sebagai dasar dalam melakukan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan
			2022	2023	
1	Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	88%	116,80	142,29	25,49

Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dari sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah dengan indikator Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah diaudit dengan Resiko Kategori Rendah mengalami peningkatan yaitu tahun 2022 sebesar 116,80% dan pada tahun 2023 sebesar 142,29%. Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

- c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Tahun Terakhir

Perbandingan data adalah suatu langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi dalam pengukuran kinerja khususnya capaian kinerja dengan mengacu pada target RPJMD atau Renstra SKPD. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini yakni tahun 2023 dengan beberapa target dokumen Renstra Dinas Kominfo dapat dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Dokumen Renstra

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
1	Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah	83%	100	142,29	142,29%

Berdasarkan data yang ada di atas, melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah telah melampaui target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 100% dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan peningkatan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat. Namun hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami dalam menentukan indikator kinerja serta target kinerja pada sasaran tersebut pada saat *Review* Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah dengan indikator Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah pada tahun 2023 telah melebihi yang ditargetkan. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah antara lain sebagai berikut :

1) Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan :

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dari pencapaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Sistem Persandian Daerah antara lain sebagai berikut antara lain sebagai berikut :

- a) Faktor mendasar yang mempengaruhi adalah masih dalam situasi pandemi sehingga komunikasi pertemuan banyak dilakukan secara tidak tatap muka sehingga komunikasi lebih intensif menggunakan media/surat elektronik dan hal tersebut mempengaruhi kinerja jaringan komunikasi informasi dan sandi; dan
- b) Dari sisi Perangkat Daerah, mereka lebih memilih menggunakan jaringan komunikasi sandi untuk desiminasi informasi dimana yang mereka perlukan selain keamanan informasi yakni informasi yang disampaikan tepat waktu.

2) Kendala-kendala dalam Mencapai Target yang Telah Ditentukan

Selain terdapatnya penyebab keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja. Adapun penyebab kegagalan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain yaitu belum memiliki layanan jaringan komunikasi yang berbasis aplikasi sehingga dalam pengelolaannya masih dilakukan secara manual.

3) Alternatif Solusi

Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut antara lain yaitu Diskominfo memaksimalkan pengelolaan layanan jaringan komunikasi secara manual.

3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada diantaranya anggaran yang tersedia dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Beberapa target yang telah ditetapkan tersebut ada beberapa capaian kerjanya yang melebihi target yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi karena target yang telah ditetapkan dapat dilampaui dengan menggunakan sumber daya yang ada. **Dari 4 sasaran strategis yang ada, sebanyak 4 sasaran strategis yang pencapaian kerjanya diatas 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 36,95%.** Pemaparan lebih jelasnya terkait perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.20 dan Tabel 3.21 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Saran Strategis	(%) Capaian Kinerja	(%) Penyerapan Anggaran	(%) Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi publik	129,73	77,08	52,65
2	Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	36,00	94,52	-58,52
3	Meningkatnya jumlah layanan informasi publik dan statistik sektoral	93,62	97,16	-3.54
4	Meningkatnya sistem persandian daerah	142,29	95,93	46,36
Total Tingkat Efisiensi Sumber Daya				36,95%

Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total Program/ Kegiatan yang dianggarkan		Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran	
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	2	3	4 = (2-3)	5 = 3/2*100%	6	7	8	9
2023	Rp 17.959.372.858,00	Rp 15.175.137.562,00	Rp 2.784.235.296,00	84,50	5	14	4	4

Berdasarkan data di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana.

3.1.8 Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dapat dicapai dengan adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yakni rencana strategis dan rencana kerja tahun 2023 yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 seperti yang terdapat dalam pada Tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.22 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10/9*100%)	12
1	Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase Penyebaran Informasi Publik	%	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Layanan Hubungan Media	64%	129,73	202,70	Melampaui Target (MT)
2	Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Persentase Aplikasi layanan Pemerintah dan Publik yang diselenggarakan secara online	%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	20%	36	180	Melampaui Target (MT)
3	Peningkatan Pengelolaan Informasi Data Statistik Sektoral	Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19%	93,62	492,74	Melampaui Target (MT)
4	Peningkatan Sistem Persandian Daerah	Meningkatnya Sistem Persandian Daerah	Persentase surat sistem elektronik atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	88%	142,29	161,69	Melampaui Target (MT)

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, maka dapat disampaikan hal sebagai berikut :

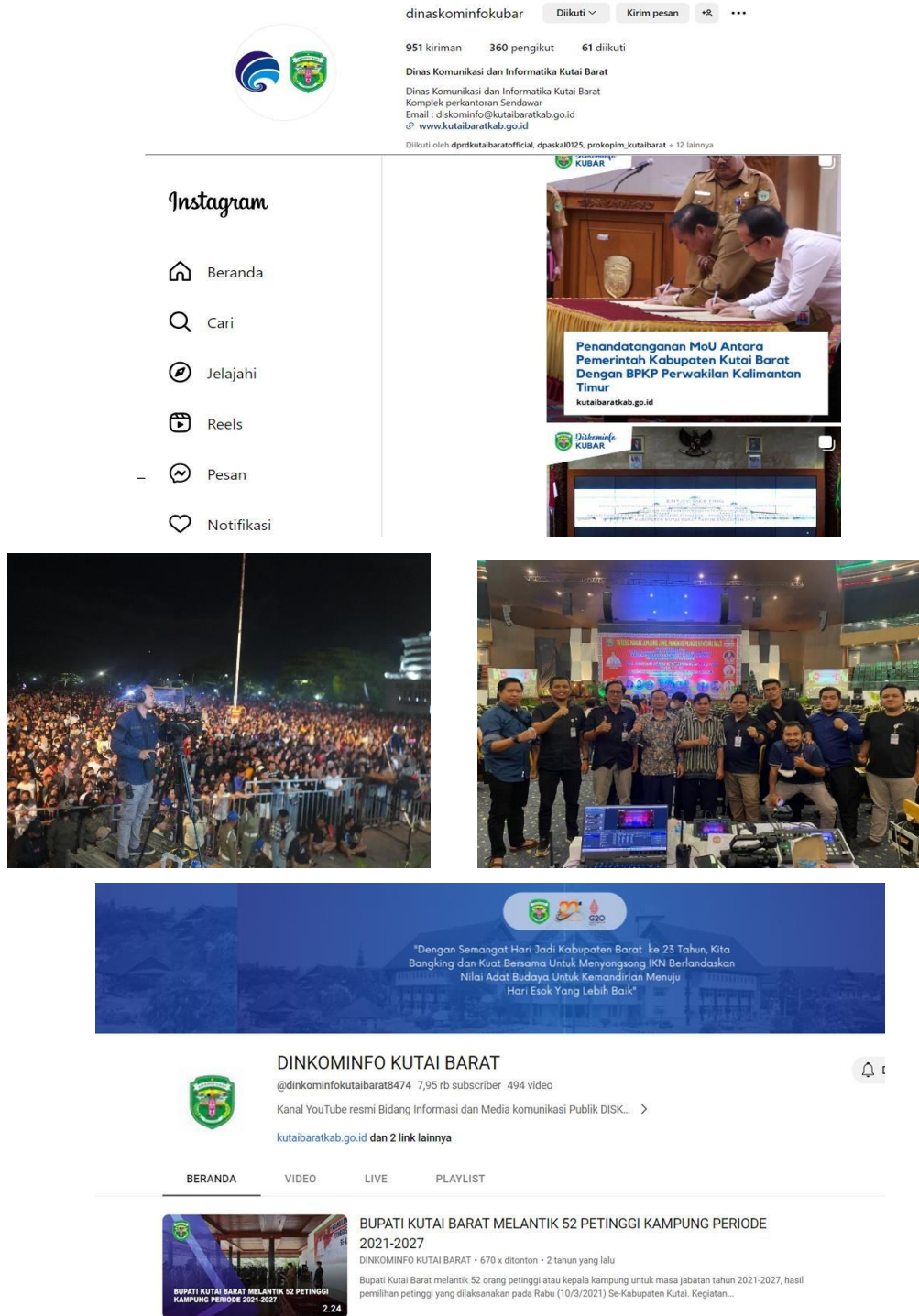
1. **Sasaran Strategis : Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik**

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 1 : **Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator **Persentase Penyebaran Informasi Publik** didukung oleh beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
- c. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.

Pada sub kegiatan satu dan dua tersebut dikelola oleh Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik. Sementara pada sub kegiatan Layanan Hubungan Media dikelola oleh Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang ada di Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1
Dokumentasi Kegiatan Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya dan Komunikasi Publik

Transparansi dewasa ini merupakan suatu hal yang begitu intens didengarkan oleh berbagai elemen masyarakat, terkait dengan berbagai gejala, peristiwa dan realitas yang silih berganti terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat. Keinginan untuk meningkatkan eksistensi diri melalui perbaikan struktur sosial berdasarkan tatanan sosial, ekonomi dan politik menjadi sekian banyak alasan mengapa kubutuhan akan sebuah informasi itu harus dipenuhi, disamping faktor pendidikan dan pengalaman. Disadari atau tidak media sebagai saluran informasi yang faktual dan aktual memiliki peran tersendiri dalam pembentukan karakter publik.

Media dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif begitu masif mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi kepada publik. Beberapa analisa tersebut bisa memberikan pengaruh tertentu bagi publik guna mengkritisi apa yang terjadi di ruang publik itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana telah diatur tentang kewajiban suatu badan publik dalam memberikan informasi kepada publik. Pada pasal 3 ayat a diamanatkan bahwa salah satu tujuan diterbitkannya regulasi ini adalah untuk menjamin hak warga negara pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Secara lebih spesifik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Berbagai kebijakan daerah, rencana pembangunan, prestasi atau bahkan kesalahan kebijakan sekalipun harus mampu disampaikan dengan baik oleh Government Public Relation. Akan sangat tepat jika publik mengetahui langsung dari sumber yang kredibel ketimbang mereka memperoleh informasi dari pihak lain yang mungkin saja memiliki berbagai kepentingan lain.

Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah untuk menyediakan konten informasi yang dikelola melalui berbagai media komunikasi publik.

Sementara itu, beberapa kegiatan lainnya yang ada di Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut :



Gambar 3.2
Dokumentasi Kegiatan Sub Koordinator Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang membawahi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Kutai Barat, untuk kelancaran Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pada pelaksanaannya perlu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk memfasilitasi dalam melaksanakannya penyelesaian draf Perjanjian Kerjasama / MoU melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk kelancaran Kegiatan Kerjasama TVRI dan Kegiatan Kerjasama Pemberitaan Media Elektronik RRI.

Maksud dari Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah untuk memfasilitasi dalam perumusan/ penyusunan regulasi / MoU / PKS kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik sehingga terlaksananya Kerjasama Pemberitaan Melalui Media Elektronik dan Kerjasama TVRI lokal maupun nasional.

Tujuan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik untuk memfasilitasi dalam perumusan/penyusunan regulasi / MoU / PKS kebijakan bidang informasi dan komunikasi kerjasama sehingga terlaksananya kerjasama pemberitaan melalui media elektronik dan kerjasama TVRI kerjasama maupun nasional, yang bertujuan apabila telah terselenggaranya perjanjian kerjasama tersebut di atas maka kepentingan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berkaitan dengan publikasi tentang informasi-informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang akan dipublikasikan kepada masyarakat sampai ke pelosok baik dalam dan luar daerah, dapat terlaksana dan terarah pada tujuan yang telah direncanakan. Maksud dari Kerjasama Pemberitaan Melalui Media Elektronik dan Kerjasama TVRI untuk menyiapkan media publikasi guna menyebarkan informasi tentang kejadian sehari-hari dan pembangunan Kabupaten Kutai Barat.

Tujuan dari Kerjasama Pemberitaan Melalui Media Elektronik (RRI) dan Kerjasama TVRI untuk kegiatan serta informasi-informasi yang menggambarkan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang akan dipublikasikan kepada masyarakat sampai ke pelosok baik dalam dan luar daerah, dapat terlaksana dan terarah pada tujuan yang telah direncanakan.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 2 : **Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi** dengan indikator **Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online*** didukung oleh satu Sub Kegiatan yaitu **Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Pemerintahan.**

Pada sub kegiatan ini dikelola oleh Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika. Beberapa dokumentasi kegiatan yang ada di Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai berikut :



Gambar 3.3
Dokumentasi Kegiatan Koordinator Pengembangan Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat informasi menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tentu saja dalam pemerintahan juga tidak luput dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan dan strategi pembuatan *Electronic Government (e-Government)* sebagaimana diamanatkan dalam inpres 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pembuatan *e-Government*, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati / Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pembuatan *e-Government* secara nasional.

Untuk menunjang pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis *e-Government* maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 3 Tahun 2003 tentang *e-Government* yang merupakan dasar pemerintah dalam menerapkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis *e-Government*. Adapun lingkup dan cakupan implementasi *e-Government* yaitu dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Adanya aplikasi *e-Government* di Kabupaten Kutai Barat dengan dasar dasar Inpres No.3 Tahun 2003, yaitu upaya meningkatkan antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan pihak-pihak lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan Sub Kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2023. Aplikasi Kubar OK telah dibuat pada tahun 2020. Di dalam aplikasi tersebut telah memuat 23 layanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada tahun 2021 aplikasi tersebut telah dikembangkan dan dilakukan perbaikan pada bagian menu-menu yang akan dikembangkan. Dalam pengembangan aplikasi tersebut menggunakan tenaga ahli analis aplikasi, tenaga ahli programmer berbasis web dan tenaga ahli programmer berbasis android. Mengingat kegiatan tahun 2021 sifatnya perawatan, perbaikan dan pengembangan aplikasi Kubar OK. Pada tahun 2021 pengembangan aplikasi kubar ok telah siap digunakan.

Di tahun 2023 telah dilaksanakan *IT Security Assesment* dan semua celah yang ditemukan oleh Tim Assesor telah ditutup. Kemudian beberapa *bug* yang ditemukan telah dilakukan perbaikan. Pengembangan aplikasi Kubar OK yang telah dilakukan pada tahun 2023 meliputi :

- 1) Informasi pada tampilan utama pada aplikasi telah dibuat otomatis mengambil berita/informasi dari website Kabupaten kutaibaratkab.go.id sehingga admin/operator tidak lagi mengimput berita/informasi pada aplikasi Kubar OK secara manual;
- 2) Tampilan gambar pada informasi telah disesuaikan ukurannya sehingga tampilan gambarnya tidak terpotong dan sesuai rasio gambar dari sumber informasi;
- 3) Gambar header pada menu OPD telah disesuaikan dengan resolusi gambar yang diinput pada *dashboard* admin sehingga gambar tidak terpotong;
- 4) Pada menu layanan dalam menu OPD telah ditambahkan fitur untuk memasukan link sehingga jika ada layanan dari luar aplikasi Kubar OK (layanan yang menggunakan aplikasi milik pusat) sudah dapat disematkan pada list menu layanan OPD; dan
- 5) Perbaikan pada pesan yang diterima pengguna Android yang sebelumnya jika layanan disetujui pesan tidak tersampaikan kepada pengguna sudah diperbaiki sehingga operator dapat mengirim pesan kepada pengguna pada saat proses layanan ditolak, diterima dan selesai.

Dengan selesainya pengembangan aplikasi Kubar OK diharapkan aplikasi ini dapat bekerja secara maksimal sesuai harapan dan yang lebih utama agar seluruh OPD yang dalam tupoksinya ada layanan publik agar dapat turut serta dalam penggunaan aplikasi ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara daring.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran 3 : **Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral** dengan indikator **Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah** didukung oleh satu Sub Kegiatan yaitu **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral**.

Pada sub kegiatan ini dikelola oleh Seksi Statistik. Beberapa dokumentasi kegiatan yang ada di Seksi Statistik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.4 sebagai berikut :



Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Seksi Statistik

Berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Dalam upaya sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral bisa dilaksanakan melalui koordinasi maupun pertemuan-pertemuan semisal *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terfokus yang membutuhkan fasilitator/moderator terlatih dan terandalkan, yaitu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Metode ini mengandalkan perolehan data atau informasi dari suatu interaksi informan atau responden berdasarkan hasil diskusi yang berfokus dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Keunggulan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data Kabupaten Kutai Barat dan BPS sebagai Pembina Data Kabupaten Kutai Barat serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan Koordinasi dan Sinkronisasi kepada pihak terkait serta seluruh OPD. Dalam pelaksanaannya nanti

bisa berupa pertemuan koordinasi dalam skala kecil maupun melalui FGD. FGD maupun kegiatan pengumpulan data lainnya seperti melakukan *roadshow* ke OPD terkait sehingga menghasilkan data berkualitas untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat. Hal ini diarahkan untuk mendukung Pemerintah Daerah yang bersih dan transparan serta untuk melaksanakan Satu Data Indonesia bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik, maka dipandang perlu untuk membuat suatu Surat Keputusan Bupati untuk menjadi Operator Pengumpulan Data pada setiap OPD yang bertugas untuk menginput data dalam Portal Satu Data Kabupaten Kutai Barat yang kemudian akan di sinkronisasikan dengan Satu Data Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian di Integrasikan dengan Portal Nasional Satu Data Indonesia yang menjadi dasar untuk tata kelola metadata statistik di Kabupaten Kutai Barat. Adapun metadata sendiri adalah suatu informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditentukan kembali, digunakan atau dikelola.

Maksud dari kegiatan tersebut yaitu untuk menyamakan persepsi, rumusan yang tepat, terarah dan jelas serta pemahaman yang sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui koordinasi maupun FGD Statistik Sektoral, serta pengumpulan melalui Roadshow maupun Portal Data Kabupaten Kutai Barat dalam memberi acuan pelaksanaan dan pedoman serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Program Satu Data Indonesia perlu menerapkan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2022.

Harapan besar dari kegiatan tersebut adalah dengan diterapkannya koordinasi maupun FGD, terjadi sinkronisasi atau penyamaan persepsi dari setiap OPD atau pihak terkait dalam upaya pelaksanaan Satu Data Kutai Barat yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia bagi kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Agar tata kelola data statistik sektoral yang baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat dibagi pakaikan oleh para pihak dan OPD terkait.

4. Sasaran Strategis : Peningkatan Sistem Persandian Daerah

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Sasaran **Meningkatnya Sistem Persandian Daerah** dengan indikator **Persentase Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah di Audit dengan Resiko Kategori Rendah** didukung oleh satu Sub Kegiatan yaitu **Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.**

Pada sub kegiatan ini dikelola oleh Seksi Persandian. Beberapa dokumentasi kegiatan yang ada di Seksi Statistik pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 3.5 sebagai berikut :



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Seksi Persandian

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Barat. Dalam hal ini diperlukan adanya strategi keamanan informasi yang didukung oleh sistem dan teknologi yang tepat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keamanan informasi dan data yang berkategori rendah dan mewujudkan layanan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terutama tercapainya efektivitas dan efisiensi layanan jaringan komunikasi, data dan informasi secara digital.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dalam 4 triwulan dari bulan Januari hingga Desember 2023. Secara teknis kegiatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah terbagi dalam pola hubungan jaringan komunikasi melalui radio *Single Side Band* (SSB) atau *Handy Talky* (HT) dan melalui aplikasi *WhatsApp*.

Terkait pemanfaatan Radio sebagai media untuk menyampaikan informasi sangat dimungkinkan pada saat ini untuk mengantisipasi terjadinya gangguan jaringan internet. Sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Barat masih mempertahankan keberadaan peralatan Radio jenis SSB atau HT ini sebagai alternatif, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri, komunikasi dalam menyampaikan informasi dengan perangkat daerah di kecamatan hingga saat ini pengiriman surat atau informasi penting banyak menggunakan aplikasi *WhatsApp* dan Radio SSB atau HT jika terjadi gangguan jaringan internet.

Sebagaimana diketahui bahwa data dan informasi yang bersifat internal maupun rahasia organisasi, keamanan dan kerahasiaannya harus tetap terjaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Oleh sebab itu setiap *sandiman* di daerah perlu mendapat pemahaman, kesadaran dan pengetahuan teknis dalam upaya pengamanan data dan informasi.

Pada kegiatan lainnya seperti kegiatan pengambilan kunci sandi, selain materil sandi yang diamankan baik data/informasi yang sangat rahasia juga dilakukan koordinasi teknis bagi para *sandiman* di setiap Kabupaten/Kota terkait kebijakan keamanan sandi kemsiber nasional sesuai ketentuan dan peraturan sebagai dasar hukumnya.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan keamanan data dan informasi sandi pemerintah daerah dan mewujudkan layanan pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terutama agar tercapainya efektivitas dan efisiensi layanan administrasi publik, ketahanan siber, data dan informasi pemerintah daerah.

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.17.959.372.858,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 15.175.137.652,00** sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sehingga menjadi SILPA sebesar **Rp.2.784.235.206,00**.

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran 2023

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	<u>17.260.524.768,00</u>	<u>14.560.571.501,00</u>	<u>79,00</u>	<u>2.699.953.267,00</u>
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.199.242.579,00	10.493.777.569,00	75,00	1.705.465.010,00
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.790.000,00	13.026.700,00	33,87	25.763.300,00
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000,00	2.988.000,00	24,41	9.252.000,00
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.700.000,00	7.219.500,00	56,85	5.480.500,00
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.850.000,00	2.819.200,00	20,36	11.030.800,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.182.188.909,00	4.961.960.041,00	64,08	1.220.228.868,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.153.993.909,00	4.945.380.341,00	80,36	1.208.613.568,00
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.840.000,00	2.176.400,00	24,62	6.663.600,00
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.175.000,00	9.175.000,00	100,00	-

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.180.000,00	5.228.300,00	51,36	4.951.700,00
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	292.514.700,00	220.837.390,00	72,75	71.677.310,00
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	163.705.100,00	156.837.390,00	95,80	6.867.710,00
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.809.600,00	64.000.000,00	49,69	64.809.600,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.065.531.154,00	979.587.768,00	88,56	85.943.386,00
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.170.634,00	38.238.814,00	86,57	5.931.820,00
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.989.400,00	13.074.600,00	87,23	1.914.800,00
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.098.900,00	25.640.100,00	77,47	7.458.800,00
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.990,00	9.767.500,00	97,68	232.490,00
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	331.189.230,00	286.244.740,00	86,43	44.944.490,00
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	632.083.000,00	606.622.014,00	95,97	25.460.986,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.125.268.296,00	1.121.080.042,00	99,75	4.188.254,00
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	272.601.792,00	272.600.042,00	100,00	1.750,00
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	852.666.504,00	848.480.000,00	99,51	4.186.504,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.298.208.452,00	3.068.009.103,00	93,34	230.199.349,00
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	988.000,00	900.000,00	91,09	88.000,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.060.668,00	77.813.429,00	95,99	3.247.239,00
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.216.159.784,00	2.989.295.674,00	92,95	226.864.110,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.741.068,00	129.276.525,00	72,68	67.464.543,00
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.836.600,00	33.954.425,00	81,16	7.882.175,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.296.050,00	61.320.300,00	62,38	36.975.750,00
2.16.01.2.09.03	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	4.799.442,00	4.505.800,00	93,88	293.642,00
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.060.595,00	11.000.000,00	99,45	60.595,00
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.028.000,00	12.896.000,00	41,56	18.132.000,00

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.720.381,00	5.600.000,00	57,61	4.120.381,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.061.282.189,00	4.066.793.932,00	80,99	994.488.257,00
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.248.171.132,00	1.816.924.876,00	77,80	431.246.256,00
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.248.171.132,00	1.816.924.876,00	77,80	431.246.256,00
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	16.230.000,00	14.761.100,00	90,95	1.468.900,00
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	162.386.603,00	107.201.979,00	66,02	55.184.624,00
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	276.621.250,00	171.739.105,00	62,08	104.882.145,00
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	387.082.391,00	315.567.040,00	81,52	71.515.351,00
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	74.999.958,00	42.694.186,00	56,93	32.305.772,00
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.258.238.230,00	1.102.830.882,00	87,65	155.407.348,00
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	48.145.000,00	38.130.910,00	79,20	10.014.090,00
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.467.700,00	23.999.674,00	98,09	468.026,00
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.813.111.057,00	2.249.869.056,00	84,18	563.242.001,00
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.964.167.174,00	1.564.766.699,00	88,17	399.400.475,00
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106.879.000,00	104.425.979,00	97,70	2.453.021,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.857.288.174,00	1.460.340.720,00	78,63	396.947.454,00
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	848.943.883,00	685.102.357,00	80,19	163.841.526,00
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	163.585.000,00	157.383.645,00	96,21	6.201.355,00
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	413.749.883,00	326.703.201,00	78,96	87.046.682,00
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	138.234.000,00	99.548.611,00	72,01	38.685.389,00
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	63.608.000,00	60.120.900,00	94,52	3.487.100,00
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	69.767.000,00	41.346.000,00	59,26	28.421.000,00

KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	<u>233.087.790,00</u>	<u>199.871.400,00</u>	<u>88,51</u>	<u>33.216.390,00</u>
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	233.087.790,00	199.871.400,00	88,51	33.216.390,00
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	233.087.790,00	199.871.400,00	88,51	33.216.390,00
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79.401.950,00	77.146.700,00	97,16	2.255.250,00
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	153.685.840,00	122.724.700,00	79,85	30.961.140,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	<u>465.760.300,00</u>	<u>419.458.461,00</u>	<u>92,53</u>	<u>46.301.839,00</u>
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	465.760.300,00	419.458.461,00	92,53	46.301.839,00
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	373.762.800,00	328.914.961,00	86,64	44.847.839,00
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	214.189.300,00	205.481.798,00	95,93	8.707.502,00
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	159.573.500,00	123.433.163,00	77,35	36.140.337,00
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	91.997.500,00	90.543.500,00	98,42	1.454.000,00
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91.997.500,00	90.543.500,00	98,42	1.454.000,00
TOTAL		17.959.372.858,00	15.179.901.362,00	84,52	2.779.471.496,00

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya didasari dengan asas akuntabilitas yang memerlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang wajib disusun oleh instansi pemerintah baik dari tingkat Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota sampai dengan perangkat daerah untuk mengetahui tingkat akuntabilitasnya. Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja yang ada di Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat memiliki 4 (empat) sasaran strategis yakni dengan 4 (empat) Indikator kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis :** Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
Indikator Kinerja : Presentase Penyebaran Informasi Publik
Capaian kinerja dari sasaran strategis ini yakni 129,73% dengan realisasi 1.946 pemberitaan dari target kinerja sebesar 64% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**sangat tinggi**”;
- 2. Sasaran Strategis :** Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi
Indikator Kinerja : Persentase Aplikasi Layanan Pemerintah dan Publik yang Diselenggarakan Secara *Online*
Capaian kinerja dari sasaran strategis ini yakni 36% dengan realisasi 18 Layanan dari target kinerja sebesar 20% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**sangat rendah**”, walaupun realisasi capaian kinerja rendah tetapi dengan catatan target yang ada telah **Melampaui Target (MT)**;

3. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral

Indikator Kinerja : Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja dari sasaran strategis ini yakni 93,62% dengan realisasi sebanyak 44 OPD dari target kinerja sebesar 19% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**sangat tinggi**”; dan

4. **Sasaran Strategis** : Meningkatnya Sistem Persandian Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Surat Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah

Capaian kinerja dari sasaran strategis ini yakni 142,29% dengan realisasi sebesar 498 surat dari target kinerja sebesar 88% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja “**sangat tinggi**”.

Berdasarkan data keseluruhan yang ada, capaian rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **100,41%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Tinggi**. Dengan demikian, dari rata rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat tahun 2021–2026.

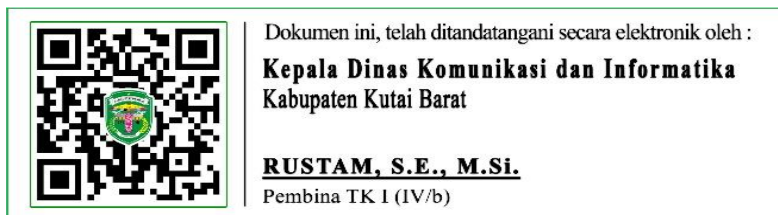
4.2 Saran

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan hasil yang baik dengan hasil dapat melewati target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk pada tahun 2023 yakni sasaran 1 yaitu Meningkatnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, sasaran 3 yaitu Meningkatnya Jumlah Layanan Informasi Publik dan Statistik Sektoral dan sasaran 4 yaitu Meningkatnya Sistem Persandian Daerah. Namun untuk tetap meningkatkan kualitas dan peningkatan pencapaian kinerja maka ada beberapa langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat dan juga dalam upaya strategi untuk menghadapi tantangan ke depan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan *e-government* guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat;
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan Kabupaten dan layanan publik yang diberikan serta dalam mewujudkan *smart city*;
4. Berupaya untuk meningkatkan dan menambah jumlah SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
5. Mengikutsertakan pegawai dalam bidang informasi komunikasi dan publikasi dalam bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan;
6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.

Laporan Kineija ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kineija Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Sendawar, 23 Februari 2023



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI

